



**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) KENDARAAN DINAS DALAM MENINGKATKAN PAJAK ASLI
DAERAH KABUPATEN MAROS**

***THE EFFECTIVENESS OF COLLECTING MOTOR VEHICLE TAX FOR
OFFICIAL VEHICLES IN INCREASING LOCAL GENUINE TAX
REVENUE IN MAROS DISTRICT***

Humairah Almahdali¹, Ahmad Rosandi Sakir²

^{1,2}Universitas Pattimura

¹humalume@gmail.com

²ahmadrosandi8@gmail.com

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah. Semakin besar jumlah kendaraan yang berada di setiap daerah, semakin besar peluang untuk berkontribusi pada penerimaan di wilayah tersebut. Selain kendaraan pribadi, kendaraan umum dan kendaraan dinas juga wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas di suatu daerah berbanding lurus dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di wilayah tersebut. Kendaraan dinas dapat dikenali dengan plat berwarna merah, dan besarnya Nilai Pajak Kendaraan Bermotor cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif kualitatif, dengan responden yang terdiri dari kepala UPT Pendapatan Maros dan Bagian Aset Pemda Maros. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Maros belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Dinas, Efektivitas

Abstract

Motor Vehicle Tax is one of the original sources of local income that contributes considerable to government financing and development in each region. The greater the number of vehicles in the loyal area, the greater the opportunity to contribute to receipts in each region. In addition to Private Vehicles, Public Vehicles and Service Vehicles also do not escape the obligations of Motor Vehicle Taxpayers. The amount of receipt of Motor Vehicle Tax in one area is directly proportional to the number of service vehicles in an area. Service vehicles are marked with red plating plates and large Motor Vehicle Tax Value is lower than that of Private and Public Vehicles. Research methods are qualitatively deductive. Respondents are the head of UPT Maros Revenue and Maros Local Government Asset Section. The results of the study explained that the receipt of official vehicle taxes in Maros district has not been effectively proven by the number of arrears against government-owned service vehicles that have not been paid.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Service Vehicles, Effectiveness



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan negara dengan tujuan membiayai pengeluaran dan kebutuhan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat diterapkan wajibnya, meskipun tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat dilihat, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta sebagai wujud partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan daerah menjadi penting, dan pembiayaan pembangunan nasional dipermudah oleh pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menggali potensi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah (Suseka, 2017).

Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, melibatkan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pembiayaan utama, dan tingginya peran PAD dalam pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan daerah dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan (TBSA, 2014).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Daerah. PKB memiliki potensi besar karena transportasi saat ini menjadi kebutuhan masyarakat, baik dalam transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Dalam era ini, kepemilikan kendaraan pribadi telah menjadi tuntutan dan keharusan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Dukungan kredit dari berbagai pihak turut mempengaruhi peningkatan penerimaan PKB, terutama dengan munculnya berbagai kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal ini mendorong tingginya penerimaan PKB dibandingkan dengan pajak provinsi lainnya (Susanti, Cania, dan Rosya, 2020).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA) (Suseka, 2017) berperan sebagai badan teknis dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang melaksanakan kewenangan untuk mengelola dan memungut Pendapatan Daerah, khususnya pajak-pajak di empat provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Dalam upaya memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat, didirikanlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di setiap daerah, seperti yang telah ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Nuriyanto, 2014).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros pada triwulan 2 tahun 2023 tercatat sangat baik, terutama dengan berbagai program unggulan yang telah dijalankan dengan sukses. Namun, terdapat kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor terkait minimnya kontribusi dari kendaraan dinas. Meskipun pada triwulan kedua seharusnya sudah terbayar sebanyak 50 persen, pada akhir bulan Juni 2023, tingkat penerimaan masih hanya mencapai 23 persen (Kurniawan, 2017).

Situasi ini menjadi fokus perhatian Pemerintah, khususnya UPT Pendapatan Maros, untuk meningkatkan upaya penagihan terhadap pajak kendaraan dinas, baik kepada ASN maupun kepada bagian Aset Pemda Maros. Langkah-langkah ekstra perlu diambil agar target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai melalui pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Maros (Kolaborasi et al., 2019).

Artikel ini akan mengulas faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh UPT Pendapatan Maros dalam menjalankan proses penagihan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas di Kabupaten Maros.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena berangkat dari sejumlah teori dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena semua teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk diuji, tetapi sebagai panduan dalam menentukan konteks dan fokus penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Studi Kasus, dipilih karena peneliti ingin menjalankan wawancara mendalam untuk menggambarkan proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas (Heckman, Pinto, dan Savelyev, 1967).



Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kantor SAMSAT Maros. Tempat ini merupakan tempat di mana wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 hingga bulan Juni 2023.

Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi langsung. Data wawancara diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Informan adalah individu yang memiliki pemahaman yang baik dan terlibat secara langsung dalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, data yang diperoleh dari observasi langsung adalah hasil pengamatan terhadap objek di tempat terjadinya suatu peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerimaan pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor, seharusnya mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penggunaan kendaraan pribadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor oleh UPT Pendapatan Maros, penting untuk memastikan bahwa sasaran yang tepat diakui dan program-program yang dilaksanakan efektif agar penerimaannya bisa mencapai hasil yang optimal.

Setiap pegawai di UPT Pendapatan Maros diharapkan memiliki peran aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam rangka mendukung keberhasilan program-program yang ada, beberapa di antaranya dijalankan setiap tahun. Melihat banyaknya peran yang harus diemban oleh pimpinan dan pegawai UPT Pendapatan Maros dalam menjalankan tugas, teori peran dapat diterapkan untuk menganalisis interaksi sosial yang melibatkan berbagai unsur baik dari mitra maupun masyarakat wajib pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, individu dihadapkan pada berbagai peran yang berbeda, bergantung pada tugas dan fungsi masing-masing, yang berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (AR Sakir, 2021).

Kendaraan milik pemerintah atau kendaraan dinas juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kendaraan dinas dapat diidentifikasi dengan plat nomor warna merah pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Meskipun jumlah pembayaran pajak untuk kendaraan dinas lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan umum dan pribadi.

Pembayaran pajak kendaraan dinas dilakukan oleh pemerintah melalui biro aset, dengan tagihan yang disusun oleh kasi pendataan dan penagihan UPT Pendapatan Maros. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara UPT Pendapatan Maros dan Pemerintah Daerah sangat penting agar penerimaan pajak bisa optimal. Pernyataan berikut berasal dari wawancara dengan salah seorang narasumber:

"Terkait dengan kendaraan dinas, kami melakukan komunikasi intensif setiap bulannya dengan Pemda terkait pembayaran pajak kendaraan dinas. Ini karena masih banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Dalam apel kendaraan dinas yang diadakan oleh Pemda, kami dari BAPENDA juga hadir untuk memeriksa pajak kendaraan bermotor yang digunakan oleh pegawai Pemda."

Pernyataan dari pemerintah Kabupaten Maros juga menekankan pentingnya koordinasi:

"Masalah utamanya adalah beberapa pegawai membayar pajak langsung ke kantor SAMSAT, tanpa melalui kami terlebih dahulu. Ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara database yang kami miliki dengan tagihan dari SAMSAT. Kami sudah berulang kali menegaskan bahwa pembayaran pajak harus melalui kami terlebih dahulu, nanti kami akan mengeluarkan surat keterangan."

Dari hasil koordinasi antara UPT Pendapatan Maros dan Pemerintah Daerah, penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas dihasilkan, seperti terlihat pada data berikut ini:



Tabel 1

Penerimaan PKB Kendaraan Dinas Januari – Juni 2022

No.	Bulan	Penerimaan (Rupiah)
1	Januari	30.630.200
2	Februari	26.883.530
3	Maret	36.235.000
4	April	18.351.900
5	Mei	14.462.410
6	Juni	21.850.400
TOTAL		148.432.240

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Pembahasan

Dari data yang terdapat pada tabel sebelumnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas tercatat dalam jumlah yang signifikan. Hingga bulan Juni 2023, penerimaan telah mencapai 148 juta Rupiah. Meskipun jumlah ini memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target, ternyata masih belum mampu mencapai target penerimaan yang seharusnya, yakni sekitar 361.780.000 Rupiah hingga bulan Juni 2023. Keadaan ini tentu menjadi poin evaluasi bagi UPT Pendapatan Maros untuk mempertajam upaya dalam menggiatkan proses tagihan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dinas.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas di Kabupaten Maros dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Faktor pendukung, seperti yang diuraikan oleh Ratnasari, Nempung, dan Suriadi (2016), merujuk pada faktor yang mendorong perilaku individu atau kelompok, termasuk dalam hal ini keterampilan dan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penerimaan pajak kendaraan bermotor, faktor pendukung meliputi semua hal yang mendukung proses pemungutan pajak tersebut. Beberapa faktor pendukung dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Potensi Besar di Kabupaten Maros

Besarnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Maros memberikan peluang besar bagi Pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini juga berlaku untuk kendaraan dinas, mengingat potensi jumlah kendaraan dinas di Kabupaten Maros mencapai Rp. 3.653.829.380. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan, Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros..

2. Pelayanan Pembayaran yang Inovatif

Di Kabupaten Maros, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dapat dilakukan di Samsat Stasioner, tetapi juga di gerai samsat keliling yang beroperasi di berbagai lokasi di kabupaten tersebut. Terdapat sekitar 7 titik gerai pelayanan yang tersebar di berbagai tempat. Ketersediaan opsi ini memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, berpotensi untuk mengoptimalkan penerimaan.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas:

1. Kurangnya Kordinasi antara UPT Pendapatan dan Pemda

Kendala utama yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas adalah kurangnya koordinasi antara UPT Pendapatan dan Pemerintah



Daerah Maros. Terkadang, surat tagihan yang dikirimkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas diabaikan, dan proses pembayarannya menjadi lambat..

2. Kurangnya Kepatuhan dan Ketiadaan Kesadaran ASN
3. Kesadaran aparat sipil negara (ASN) yang menggunakan kendaraan dinas untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dinilai rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pajak. ASN seharusnya lebih patuh dan mematuhi kewajiban tersebut.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas, penting bagi UPT Pendapatan Maros untuk merumuskan strategi yang berfokus pada mengatasi faktor-faktor penghambat ini, sambil memanfaatkan faktor pendukung guna mencapai target penerimaan yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas di Kabupaten Maros memiliki potensi yang signifikan, terutama dengan jumlah penerimaan yang telah mencapai 148 juta Rupiah hingga bulan Juni 2023. Meskipun kontribusi ini positif dalam pencapaian target, nyatanya belum mampu mencapai target penerimaan yang seharusnya, yaitu sekitar 361.780.000 Rupiah hingga bulan Juni 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memahami dan mengatasi hambatan yang menghambat pencapaian target penerimaan ini.

Faktor pendukung yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas adalah potensi besar jumlah kendaraan di Kabupaten Maros dan pelayanan pembayaran yang inovatif, yang memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Namun, terdapat juga faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan, seperti kurangnya koordinasi antara UPT Pendapatan dan Pemerintah Daerah serta kurangnya kesadaran ASN dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, UPT Pendapatan Maros perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah akan membantu dalam memastikan bahwa proses pembayaran pajak kendaraan dinas berjalan dengan baik dan efisien. Selain itu, edukasi dan kesadaran terhadap ASN mengenai pentingnya patuh dalam membayar pajak juga harus ditingkatkan.

Sehingga untuk mencapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang lebih optimal, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan koordinasi yang lebih baik, inovasi dalam pelayanan, serta peningkatan kesadaran dan kesadaran masyarakat, khususnya ASN, terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan melakukan tindakan strategis ini, diharapkan penerimaan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas di Kabupaten Maros dapat meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas di Kabupaten Maros, beberapa rekomendasi berikut dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak:

1. UPT Pendapatan Maros perlu menjalin koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pembayaran pajak kendaraan dinas. Proses komunikasi dan pertukaran informasi perlu ditingkatkan untuk memastikan surat tagihan tidak diabaikan dan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu. Keterlibatan aktif antara UPT Pendapatan Maros dan Pemda akan memastikan kelancaran proses pembayaran.
2. Edukasi dan kampanye yang intensif perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Program pelatihan atau sosialisasi tentang pentingnya ketaatan terhadap undang-undang perpajakan serta konsekuensinya bagi yang tidak patuh perlu diimplementasikan. Dengan kesadaran ASN yang tinggi, jumlah tunggakan pajak kendaraan dinas dapat ditekan.
3. UPT Pendapatan Maros dapat terus berinovasi dalam memberikan opsi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain gerai Samsat Stasioner, pengembangan dan perluasan gerai Samsat



Keliling perlu dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses tempat pembayaran. Kemudahan ini akan meningkatkan kepatuhan dan membantu masyarakat membayar pajak tepat waktu.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan platform online atau aplikasi mobile untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk mengirimkan pemberitahuan pembayaran secara elektronik kepada ASN dan Pemda.
5. UPT Pendapatan Maros perlu mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas. Langkah ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan lebih awal, serta memungkinkan penyesuaian strategi untuk mencapai target penerimaan.
6. Kerja sama yang erat dengan lembaga atau institusi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dapat membantu memperkuat upaya pemungutan pajak. Kolaborasi dalam bentuk pertemuan, pertukaran informasi, dan koordinasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas di Kabupaten Maros dapat ditingkatkan secara signifikan, serta mampu mencapai atau bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. *et al.* (2020) 'Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor', *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), pp. 15–23.
- AR Sakir, A.R. (2021) 'Budaya Birokrasi : Kinerja Pegawai Samsat Maros dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor', 7, pp. 25–35.
- Heckman, J.J., Pinto, R. and Savelyev, P.A. (1967) '濟無No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), pp. 685–694.
- Kolaborasi, I. *et al.* (2019) 'Jurnal Sosio Sains', 5, pp. 108–114.
- Kurniawan, R.C. (2017) 'Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), pp. 569–586. Available at: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>.
- Nuriyanto, N. (2014) 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"??', *Jurnal Konstitusi*, 11(3), pp. 428–453.
- Ratnasari, Nempung, T. and Suriadi, L.O. (2016) 'Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), pp. 82–95.
- Susanti, N., Cania, S. and Rosya, N. (2020) 'Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan', *Jurnal Ecogen*, 3(2), p. 344. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.9243>.
- Suseka, S. (2017) 'Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang)', *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan ...*, 2(1), pp. 44–62.

